

**EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN
RUMAH (KPR) SYARIAH PADA PERUMAHAN BERSUBSIDI DENGAN
AKAD *MURABAHAH* DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

DEDDY SETYAWAN

NIM : G94216096



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Deddy Setyawan
NIM : G94216096
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Pada
Perumahan Bersubsidi Dengan Akad
Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang
Sidoarjo**

Surabaya, 8 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Deddy Setyawan

NIM G94216096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Deddy Setyawan NIM. G94216096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diadakan Munaqosah Skripsi.

Surabaya, 17 Mei 2020

Pembimbing,



Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI, M.SEI

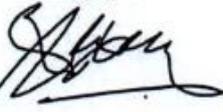
NIP. 201603311

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deddy Setyawan NIM. G94216096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 9 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

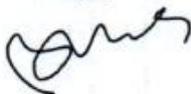
Penguji I



Ana Toni Roby Candra Yudha, M. SEI

NIP. 201603311

Penguji III



Imam Buchori, M.Si

NIP. 196809262000031001

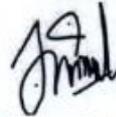
Penguji II



H. Muhammad Yazid, M.Si

NIP. 197311171998031003

Penguji IV



Muhammad Iqbal Surya Pratikno, M.SEI

NIP. 199103162019031013

Surabaya, 09 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. An Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deddy Setyawan
NIM : G94216096
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : deddysetyawan1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah

Pada Perumahan Bersubsidi Dengan Akad *Murabahah* Di BRI Syariah KC. Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2020

Penulis

Deddy Setyawan

Berdasarkan permasalahan perumahan yang ada diatas, Pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) membuat program bantuan dengan menyediakan perumahan bersubsidi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari *maqashid syariah* untuk memberikan kesejahteraan pada sesama manusia. Pemerintah memberikan bantuan bukan dalam wujud perumahan bersubsidi langsung, namun melalui bantuan dana atau lebih akrab dikenal dengan subsidi. Subsidi diberikan kepada masyarakat yang memiliki keinginan dalam mendapatkan rumah melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan syarat-syarat dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh perbankan yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah.

KPR bersubsidi adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau menengah ke bawah menggunakan sistem Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan angsuran ringan, dan tetap serta mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah. Masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah berhak mengajukan KPR bersubsidi di perbankan yang telah mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan KPR bersubsidi memang program pemerintah dengan KEMENPERA yang ditujukan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah untuk memiliki rumah idaman yang layak.

Program KPR subsidi dari pemerintah bertujuan membantu masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah atau dibawah Upah Minimum Reguler (UMR) dalam memperoleh rumah layak huni. Dalam pemberian subsidi

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan melalui media perantara yaitu dari penelitian terdahulu atau melalui buku literatur yang terkait dengan judul penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber melalui beberapa buku literatur, diantaranya :

Buku	Jurnal	Website
1) <i>Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah</i> , oleh Ahmad Ifham Sholihin, Tahun 2010.	<i>Annuals Report BRI Syariah 2019</i>	https://brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=12
2) <i>Metode Penelitian Kuantitatif</i> , Oleh Priyono, Tahun 2016.	<i>Annuals Report BRI Syariah 2018</i>	
3) <i>Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D</i> , oleh Sugiyono, Tahun 2011.		
4) <i>Fiqih Muamalah Ekonomi Islam</i> , Oleh Muhammad Yazid, Tahun 2017.		
5) <i>Ini Lho Bank Syariah !</i> , Oleh Ahmad Ifham, Tahun 2015.		
6) <i>Ini Lho KPR Syariah !</i> , Oleh Ahmad Ifham, Tahun 2016.		

demikian, hasil yang diperoleh dari analisa *capacity* adalah kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan tersebut.

Contoh penilaian dari *capacity* adalah sebuah perusahaan yang akan dilihat perkembangan dalam keuangannya dari tahun ke tahun apakah terus meningkat atau semakin menurun. Selain itu, hal-hal lain yang dapat dinilai adalah :

- a. Tingkat kemampuan laba dari perusahaan
- b. Keadaan likuiditas perusahaan
- c. Proyeksi kondisi perusahaan dimasa-masa yang akan datang berdasarkan serangkaian rencana bisnis yang di susun manajemen.

Intinya seorang debitur harus mampu meyakinkan bank bahwa calon debitur mampu untuk mengelola bisnis dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik untuk melunasi (memenuhi) kewajiban pembiayaannya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka pengertian dan karakteristik efektivitas didefinisikan oleh beberapa tokoh sebagai berikut :

- 1) Menurut H. Emerson dalam kutipan yang dibuat oleh Soewarno Handayani S. (1994:16) menjelaskan tentang “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dari rencana yang dibuat pada masa lampau”
- 2) Pendapat Drucker terkait efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar
- 3) Pendapat lain datang dari Arens dan Lorlbecke yang sudah diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf bahwa “Efektivitas fokus pada tercapainya suatu tujuan, berbeda dengan efisien yang berfokus pada Sumber Daya Manusia (SDM)”. Dari pengertian diatas, maka menurut Arens dan Lorlbecke efektivitas yaitu keberhasilan akan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.
- 4) Menurut Mulyasa dalam bukunya manajemen menjelaskan : efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan

Konsep efektivitas digunakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengevaluasi suatu program atau produk yang ada. Dalam hal ini, konsep efektivitas dapat dikatakan mampu menjadi acuan sekaligus pilihan akan perubahan pengelolaan atau manajemen dan bentuk program secara signifikan, program tersebut perlu dilakukan perubahan atau tidak.

Oleh karena itu, efektivitas adalah tercapainya tujuan terhadap program yang telah dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya yang efisien, dari input, berlanjut ke proses, untuk menghasilkan output. Sumber daya dalam hal ini yang dimaksud yaitu tersedianya SDM, sarana, dan prasarana serta metode dan model yang akan digunakan.

Suatu program kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Faktor-Faktor Pendukung Tercapainya Efektivitas

Dalam proses pencapaian efektivitas dapat diketahui dengan pemenuhan berbagai faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian efektivitas diantaranya yaitu *goal approach*, *internal process approach*, dan *system resource approach*. Setelah itu, perkembangan dari pendekatan yang lebih integratif dan dapat

- b) Strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan harus jelas dan sistematis. Hal ini dikarenakan strategi adalah jalan yang memberikan dampak dalam menggapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu lembaga keuangan.
- c) Proses analisa dan penetapan suatu kebijakan yang terbaik. Kebijakan yang baik akan menjadi jembatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan, pastinya dengan usaha-usaha operasional kegiatan yang terlaksana.
- d) Rencana yang matang, dalam hal ini rencana yang dibuat saat ini menentukan apa yang ingi diraih di masa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat dengan cara menjabarkan program-program yang akan dilaksanakan menjadi pedoman bagi para pelaksana untuk bertindak.
- f) Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja, salah satu tujuan dikatakan efektif apabila target tercapai dan sarana serta prasarana yang ada tercukupi.
- g) Melakukan pelaksanaan program yang efektif dan efisien, suatu program sebaiknya tepat sasaran dan dilakukan secara efisien dalam proses mencapainya.
- h) Sistem dalam pengendalian dan melakukan *controlling* terhadap program yang dijalankan harus selalu dioptimalkan.

Efektivitas KPR Syariah Bersubsidi dapat diketahui dengan tercapainya faktor-faktor pendukung efektivitas melalui fungsi dan tujuan, ketepatan sasaran, ruang lingkup proses pengajuan, keterjangkauan, ketersediaan sumber daya, dan akuntabilitas. Dari penjelasan diatas dijabarkan dalam keterangan dibawah ini :

- 1) **Fungsi dan tujuan**, program yang dibuat harus memiliki fungsi-fungsi yang berguna bagi manajemen, bersifat tidak mengikat, berkelanjutan, dan *simple*.

Dalam hal ini KPR Syariah bersubsidi memiliki tujuan agar masyarakat yang memiliki penghasilan rendah mampu melakukan pembiayaan dengan didukung prosedur pengajuan KPR syariah bersubsidi yang mudah. Pemerintah berperan penting dalam penentuan subsidi yang diberikan, dengan melakukan intervensi dalam pemberian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin melakukan pembiayaan KPR syariah bersubsidi. Hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan hak memiliki rumah layak huni.

- 2) **Sasaran yang tepat**, setiap program yang dibuat oleh manajemen harus jelas sarannya, dan ada evaluasi untuk

mendapatkan keakuratan, kejelasan, dan fakta pelaksanaan program di lapangan.

KPR Syariah bersubsidi harus didistribusikan pada sasaran yang tepat yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu mereka yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dalam hal ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp 4.000.00,- sebulan, belum pernah mendapatkan subsidi dan tidak pernah memiliki rumah atas nama sendiri sebelumnya.

Hal tersebut dibuktikan oleh nasabah dengan slip gaji dari kantor atau perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu, surat keterangan belum pernah memiliki rumah sebelumnya dari kelurahan.

- 3) **Ruang Lingkup (Kemudahan)**, yaitu meliputi beberapa prinsip dari kelengkapan administrasi, kesesuaian dengan fakta, dan tingkat konsistensi.

Ruang lingkup dalam hal ini mencakup persyaratan dalam pengajuan pembiayaan yang mudah dan kebutuhan fasilitas KPR Bersubsidi yang terpenuhi. Berdasarkan PUPR Nomor

- 1) KPR Non Subsidi, adalah program untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga dalam hal ini besarnya angsuran maupun bunga dilakukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.
- 2) KPR Bersubsidi, adalah kredit yang diperuntukkan pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memperoleh kebutuhan akan rumah atau memperbaiki rumah yang telah dimiliki. Dalam hal ini, subsidi yang diberikan oleh pemerintah berupa keringanan kredit dan penambahan dana pembangunan atau perbaikan rumah. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat yang mengajukan kredit dapat memperoleh subsidi. Batas yang ditetapkan pemerintah dalam memberikan subsidi yaitu penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

Dalam mencapai efektivitas subsidi yang disalurkan. Kelompok sasaran KPR subsidi adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, dengan gaji pokok bulanan maksimal Rp 4.000.000,- Peraturan mengenai bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2019 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan

rendah pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Hal tersebut diatur dalam peraturan KEMENPERA Nomor 10 pasal 1 tahun 2019, tentang masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan ingin melakukan pengajuan pembiayaan KPR subsidi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : Masyarakat yang boleh melakukan pengajuan KPR bersubsidi telah berkeluarga maupun perorangan, baik yang memiliki penghasil tetap maupun tidak tetap, sebelumnya tidak memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi dalam perumahan, dan masuk dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan maksimal penghasilan Rp 4.000.000,- dalam sebulan.

2. Dasar Hukum KPR Syariah Bersubsidi

Dasar hukum KPR Syariah bersubsidi termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2019 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Memperoleh Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau dengan nama lain KPR Subsidi adalah dukungan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dikoordinasi oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa KPR subsidi yang dikenal juga dengan KPR

pemberian subsidi dalam pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disalurkan oleh Kemenpera. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2019 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Memperoleh Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Subsidi yaitu bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat namun melalui perbankan atau perusahaan atau rumah tangga untuk tercapainya tujuan tertentu yang membuat mereka dapat mengonsumsi dan memproduksi produk yang mampu dijual dengan harga lebih murah kepada konsumen. Tujuan pemberian subsidi yaitu untuk menurunkan harga produk kepada nasabah atau meningkatkan *output*. Subsidi dalam agama Islam sangat berbeda dengan sistem Kapitalisme. Jika Kapitalisme menganggap bahwa subsidi merupakan perspektif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu sesuai waktu subsidi diperbolehkan dan subsidi wajib untuk diberikan.

Program subsidi yaitu bantuan berupa dana yang dibayar oleh negara kepada perusahaan, sehingga Islam memperbolehkan adanya subsidi untuk masyarakat. Subsidi menjadi salah satu cara (*uslub*) yang diperbolehkan untuk dilakukan negara (*Khilafah*), hal ini termasuk bantuan harta atau dana dari negara kepada individu rakyat (*I'tha'u ad-*

sini terdapat unsur pemerataan pendapatan selama masa angsuran, yang disebut dengan *payment* atau *income smoothing*.

Perbedaan dengan riba. Banyak pihak berpendapat bahwa unsur *mark up* atau margin yang ada di perbankan syariah setara dengan unsur bunga, hanya saja dengan nomenklatur yang berbeda. Namun, jika ditinjau dari substansi apa yang dibiayai, maka pendapat tersebut tidak tepat. Akad *murabahah* bukanlah akan yang memberikan pinjaman uang, tetapi akad jual beli barang yang bersifat *tangible*, dengan pembayaran yang bisa diangsur (*bai' bithaman ajil*). Jadi, prima kausa dalam akad *murabahah* bukanlah uang seperti yang ada dalam perjanjian kredit bank konvensional tetapi barang, yang merupakan hasil dari produksi ekonomi riil.

Pertama, *mark up* atau margin adalah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sedangkan bunga ditetapkan secara sepihak oleh kreditur.

Kedua, barang yang dijual ke nasabah sebelumnya sudah menjadi milik bank, atau berdasarkan hukum berada di bawah pengawasan bank. Dalam hal ini, risiko akan barang tidak terjual masih mungkin dialami bank, yang merupakan dasar untuk mendapatkan keuntungan sesuai konsep "*al-ghurmu bil ghunmi*".

Ketiga, transaksi pertama antara penjual dengan bank merupakan transaksi yang terpisah dengan transaksi kedua, yaitu antara bank dengan pembeli. Masing-masing transaksi berdiri sendiri.

Perbedaan harga antara tunai dan harga angsuran. Ditinjau dari harga yang berbeda antara harga jual atas pembayaran tunai, dengan harga yang lebih tinggi atas pembayaran tangguh atau diangsur, perbedaan ini dinilai bukan bersifat bunga atau riba, karena beberapa pertimbangan.

Pertama, hal tersebut didasari atas jual beli suatu barang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pembeli mendapatkan barang yang diperlukan tanpa langsung membayar barang tersebut, sementara penjual menjual barang tersebut tanpa menerima pembayaran secara langsung tetapi menunggu sesuai waktu yang telah disepakati.

Kedua, pembeli menerima barang sebelum membayar menjadi salah satu bentuk keuntungan atau *profit opportunity*; perbedaan harga secara tunai dan kredit menjadi faktor yang menyeimbangkan bagi penjual untuk menutupi risiko yang harus ditanggung oleh penjual, mengingat adanya waktu yang lebih lama untuk menunggu pembayaran secara berkala. Keuntungan tersebut kemudian diangsur sejalan dengan angsuran harga pokok barang yang dibeli.

Selain itu, dengan berjalannya waktu, maka jumlah yang harus dibayar secara angsuran itu tidak bertambah, hal ini sebagaimana yang terjadi pada jumlah awal saat akad dilakukan.

Jadi, KPR Syariah bersubsidi dengan prinsip *murabahah* adalah akad jual beli rumah antara bank dengan nasabah. Dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah pertama-pertama

4) Setelah rumah jadi, maka Bank Syariah akan menyalurkan kepada pembeli untuk dihuni.

Dengan perantara langsung dari developer, rumah disalurkan dengan harga jual yang merupakan jumlah dari harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

5) Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen pelengkap jika masih ada, dalam hal ini bersifat opsional.

6) Nasabah membayar rumah subsidi yang sudah dibeli dengan cara mengangsur kepada Bank Syariah.

Dari tahapan-tahapan yang ada diatas, terdapat tiga kontrak perjanjian yang perlu untuk dilakukan agar kontrak *murabahah* dapat berjalan. Kontrak pertama adalah Perjanjian Pembelian Property (PBP), dimana perjanjian yang pertama ini melibatkan perbankan dan developer sebagai pihak penyedia rumah dalam hal ini yaitu PERUMNAS. Kemudian yang kedua yaitu Perjanjian Penjualan Property (PJP), yaitu perjanjian yang melibatkan bank dengan konsumen dimana Bank menjual rumah kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dalam akad *murabahah*. Perjanjian yang terakhir adalah Perjanjian Penjaminan (PP), yang melibatkan Bank dengan konsumen dalam hal penjaminan rumah. Dimana nasabah menjaminkan rumahnya kepada bank sampai melunasi angsurannya kepada bank.

KPR Subsidi ini menggunakan pola perhitungan margin flat Berikut adalah simulasi pembiayaan KPR Syariah dengan akad *murabahah* :

C. Tujuan dan Motto Bank Republik Indonesia Syariah (BRIS)

Bank Republik Indonesia Syariah (BRIS) mulai beroperasi pada tahun 2009 dan menjadi bank yang terus melakukan berbagai persiapan dan pembenahan dalam rangka membangun pondasi yang kokoh untuk menunjang pertumbuhan bank.

BRI Syariah berusaha mengembangkan layanan dan mengoptimalkan jaringan. Hal ini diwujudkan melalui sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam bentuk Unit Pelayanan Syariah (UPS) atau Unit Mikro untuk melayani sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BRI Syariah telah meluncurkan produk baru baik berupa pendanaan maupun pembiayaan yang difokuskannya pada segmen UMKM dan Konsumer. Hal tersebut sesuai dengan misi BRIS untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah yang mudah untuk dijangkau, dan memberi kehidupan lebih bermakna.

Keberhasilan ide dan inisiatif diatas akan terlaksana jika mendapat dukungan dari sumber daya manusia yang handal dan profesional. Selain memberi kesempatan kerja kepada calon pegawai, BRI Syariah juga akan mengadakan pelatihan dalam meningkatkan *softskill* dan keahlian kerja.

Hal lain yang juga menjadi prioritas BRI Syariah yaitu memperkuat sistem teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional perbankan dalam kehidupan sehari-hari. Bank akan mengimplementasikan *Core Banking System* dan melakukan pengembangan berbagai sistem teknologi informasi dan *system* pembayaran yang modern untuk memberikan layanan prima bagi nasabah.

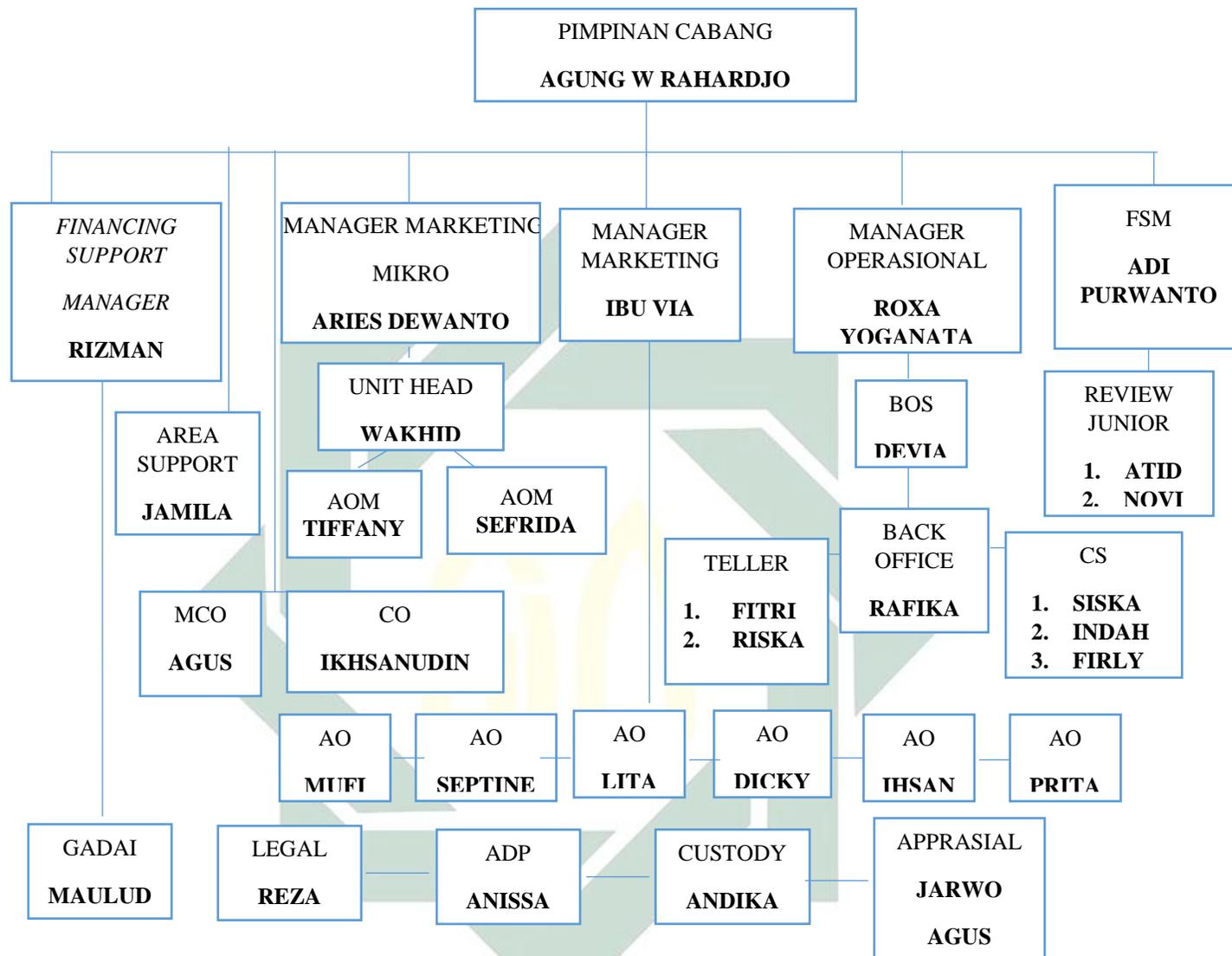
B. Gadai BRI Syariah iB

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi mendapatkan dana tunai dalam pemenuhan kebutuhan dana yang mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses lebih mudah, aman, dan cepat serta sesuai syariah untuk ketentraman nasabah. Gadai BRI Syariah menjadi pilihan yang tepat dan penuh manfaat dengan penuh berkah karena sesuai dengan prinsip syariah.

C. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank pada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan untuk memiliki hunian dengan menggunakan prinsip syariah. KPR Syariah dibagi menjadi 2 yaitu KPR Syariah non-subsidi dan KPR bersubsidi dari pemerintah. KPR Syariah non-bersubsidi adalah KPR Syariah tanpa ada bantuan pendanaan atau subsidi uang muka dari pemerintah. KPR non subsidi memiliki banyak akad yang bisa digunakan yaitu akad *murabahah*, *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, dan akad MMQ. Sedangkan KPR bersubsidi adalah pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi dengan mendapatkan bantuan pendanaan atau uang subsidi dari pemerintah. KPR bersubsidi menggunakan akad *murabahah* dan diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan maksimal gaji Rp 4.000.00,- setiap bulannya serta belum pernah memiliki rumah sebelumnya.

G. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KC. Sidoarjo



tabungan di BRI Syariah KC. Sidoarjo, tetapi untuk pembayaran angsuran bisa dilakukan di bank lain.

Margin KPR Syariah bersubsidi sendiri itu 5% dari awal sampai akhir artinya bersifat tetap. Untuk alur dimulai dari pengajuan pembiayaan, mengisi formulir, BI *Checking*, lanjut ke verifikasi nasabah. Jadi, sebelum kita proses pembiayaan itu kita melakukan kunjungan, kunjungan rumahnya dia, kunjungan tempat kerjanya dia, apakah betul dia karyawan tetap, apakah betul sebelumnya dia belum punya rumah, karena syarat utama belum punya rumah atau ini pembelian rumah pertama.

Untuk agunan yang digunakan itu rumah yang dilakukan pembiayaan tersebut. Untuk pemblokiran rekening itu saya juga ndak paham, beberapa nasabah juga tanya saya, apa sudah cair, sudah cair, tapi tidak tak jawab. Aku juga kaget, kok tanyanya ke bank, padahal kan aku sudah selesai sampai tahap akad saja.

Selanjutnya, dilakukan pengujian dokumen untuk ketepatan sasaran. Untuk menentukan kelayakan nasabah, apakah benar dia karyawan tetap, apakah betul dia tidak punya rumah, apakah rumah ini dijual pada pasar yang dituju pada pemerintah. Karena kadang kan ada yang nakal ya, kayak PNS gitu, lalu ada kunjungan dari Kementerian apakah benar rumah itu ditempati. Karena rumah subsidi harus ditempati langsung.

Fasilitas rumah subsidi mencakup jalan, listrik, kalau PDAM kayaknya tidak, tergantung lokasinya. Tapi, yang jelas jalan, listrik, dan bangunan sudah layak huni. Kriteria bangunan layak huni yaitu yang jelas

juga banyak untuk bisnis ya. Trus, kalau sampai ada kenapa-kenapa bakal di stop subsidinya toh.

Jika terkait pembayaran setiap produk sama tidak hanya KPR Syariah bersubsidi atau FLPP. Jika nasabah terlambat bayar sebenarnya setiap bank sama, diusahakan nasabah setiap bulan bisa bayar. Misalkan adapun kondisi-kondisi tertentu dimana dia tidak bisa ngangsur itu diinformasikan ke pihak bank biar bisa menemukan solusi. Karena nasabah kan memang kebanyakan diusahakan punya simpanan atau nyimpan angsuran didepan nanti digunakan untuk nutup jika ada kondisi telat. Ttapi tergantung, missal karena ada orang tua yang sakit, di PHK, atau kondisi darurat nanti kebijakan pimpinan. Bisa jadi blokir rekeningnya dibuka untuk penutupan angsuran.

Jika nanti nasabah mengalami wanprestasi, maka dilakukan lelang atau oper kredit kepada nasabah yang bersedia. Sampai sekarang, jika nasabah terjadi telat pembayaran tidak ada sanksi khususnya di BRI Syariah KC. Sidoarjo kurang tahu kalau bank lain. Selain itu, KPR Syariah bersubsidi atau FLPP di BRI Syariah KC. Sidoarjo merupakan produk pembiayaan yang efektif karena rumah yang menjadi KPR harus jelas ada, bukan masih dalam rencana atau inden.

Penerima Wajib Pajak (NPWP), Surat Nikah untuk *check* kebenaran data di notaris. Untuk sertifikat rumah akan dibawa bank atau developer sebagai penjual. Bukti nanti nasabah akan mendapatkan Akta Jual Beli (AJB) dari notaris ada dua rangkap, satu untuk bank dan satu untuk developer.

Volume subsidi yang diberikan atau Kuota Sidoarjo mendapatkan volume 4-5 Milyar dari pemerintah. Untuk harga rumah muai dari 140-160 Juta untuk wilayah Sidoarjo dan Mojokerto. Harga rumah subsidi berbeda-beda setiap provinsinya.

Semua volume diatas sudah terlasurkan habis, masih banyak nasabah yang antri. Kan kalau buruh lebih memilih atau ambil subsidi, daripada jadi kontraktor (kontrak sana-kontrak sini) lebih baik ambil KPR Syariah subsidi. Pertimbangan mereka mengambil KPR Syariah subsidi karena harganya murah. Beberapa nasabah bahkan mengambil KPR Syariah bersubsidi yang berlokasi di Mojokerto meski bekerja di Surabaya atau Sidoarjo. Mereka bisa naik kereta komuter untuk bekerja dan bisa hemat biaya. Rumah subsidi sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah dan yang penting tidak keujanan terlebih dahulu.

Untuk angsuran bisa dilunasi jika sudah melakukan angsuran selama 5 tahun, apabila nasabah sudah memiliki dana untuk pelunasan. Pelunasan bisa dilakukan tapi tidak mendapatkan potongan harga. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *murabahah* dimana harga yang

digunakan adalah harga jual beda dengan konvensional. Hal ini agar KPR Syariah bersubsidi tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang ingin memiliki rumah.

Jika nasabah mau mendapatkan potongan, nasabah bisa melakukan pengajuan diawal sebelum melakukan akad. Tapi, itu menjadi kebijakan masing-masing perbankan untuk bisa memberikan potongan atau tidaknya. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menggunakan harga penjuakan diawal dan tetap setiap tahunnya. Developer juga dipilih dari bank, harus sesuai kriteria yang telah ditentukan bank.

BRI Syariah KC. Sidoarjo sudah bergabung dan mendapatkan kuota FLPP sejak tahun 2012, namun baru berjalan tahun 2014 dan bertambah kuota dari tahun ke tahun. Meski tidak sebanyak bank BTN, tapi antusias masyarakat sangat tinggi melakukan pengajuan KPR Syariah subsidi di Bank BRI Syariah KC. Sidoarjo.

Saat nasabah tidak mampu membayar, atau macet maka rumah subsidi bisa langsung di eksekusi. Hal ini bisa dilakukan dengan pengalihan kepemilikan sementara kepada nasabah lain atau bank memberi keringanan selama jangka waktu yang wajar pada nasabah. Misal, nasabah tidak mampu menangsur karena istrinya sakit, di PHK, atau ada keluarga yang meninggal. Maka nasabah harus segera lapor atau komunikasi dengan bank untuk mendapatkan jalan tengah dalam penyelesaian angsuran KPR Syariah subsidi yang masih menjadi tanggung jawab nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, nasabah melakukan pembiayaan KPR subsidi dengan margin flat 5% dengan besar angsuran 1,2 juta dan uang muka 6 juta dan lama tenor 10 tahun. Hal tersebut sangat murah bagi nasabah berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah. Karena dengan angsuran yang ringan dan margin yang flat akan membuat MBR mampu untuk menyelesaikan pembiayaan KPR tersebut.

Kondisi rumah KPR subsidi sudah layak dan sesuai standar, terdapat fasilitas umum seperti taman/ruang terbuka, tempat olahraga/ lapangan, dengan jalan komplek yang 60% terealisasi meski ada beberapa blok belum terpaving. Selain itu, beberapa bangunan rumah subsidi ada yang retak-retak dan perlu renovasi mandiri.

Berdasarkan info dari bank dari 500 unit yang dibangun, semua sudah terjual. Tetapi hanya beberapa yang dihuni oleh pembelinya. Hal ini membuat Pemerintah mencabut subsidi dan tidak membangun beberapa sarana dan prasarana, seperti Taman fasum, jalan paving, dan lain-lain.

Namun, KPR bersubsidi sangat membantu nasabah berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah hunian. Seperti dari hasil wawancara dengan bapak Suryanto yang bekerja sebagai pegawai pembibitan ayam dengan gaji kurang dari 4 juta setiap bulannya yang dibuktikan dengan slip gaji dari tempatnya bekerja.

Mayoritas nasabah yang melakukan pengajuan KPR Syariah bersubsidi sudah memiliki keluarga dan ingin memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, keluarga tersebut melakukan pengajuan KPR Syariah bersubsidi agar bisa memiliki rumah sendiri dan tidak lagi pindah-pindah kontrakan atau kost. Hal tersebut dianggap lebih hemat dan bisa menjadi asset untuk masa depan.

Pada umumnya rumah subsidi memiliki dua kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dan teras depan rumah untuk parkir kendaraan. Selain itu, kemudahan akses menuju jalan raya menjadikan ladang untuk usaha nasabah yang melakukan pembiayaan. Hal tersebut sudah cukup bagi nasabah yang sudah berkeluarga dan memiliki satu anak yang ingin memiliki rumah.

Bangunan rumah subsidi yang dibangun oleh developer terpilih dari KEMENPERA dan memiliki kualitas yang berbeda. Hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah, karena beberapa bangunan rumah memiliki keretakan pada tembok-tembok yang telah dibangun. Selain itu, pembangunan perumahan secara massal membuat kualitas dari bahan yang dipilih harus diperhatikan betul. Karena meskipun dibangun secara massal, rumah subsidi merupakan idaman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah. Terlebih lagi, lokasi perumahan bersubsidi berada di wilayah yang sulit terjangkau dari angkutan umum dan tidak cocok untuk lokasi usaha membuat beberapa nasabah tidak jadi melakukan pembiayaan KPR bersubsidi.

B. Aplikasi Produk Pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) merupakan unit usaha syariah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) konvensional yang juga menjadi salah satu bank pelaksana program dari pemerintah dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan subsidi pemerintah atau lebih sering disebut KPR Syariah bersubsidi. Program FLPP atau KPR Syariah bersubsidi pada BRI Syariah disebut KPR Sejahtera BRI Syariah tapak iB. Hasil temuan lapangan menjelaskan, KPR BRI Sejahtera Tapak iB sudah diterapkan oleh BRIS KC. Sidoarjo sejak tahun 2014 untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah sendiri melalui perbankan dengan harga terjangkau.

Jumlah nasabah yang melakukan pengajuan KPR Syariah Sejahtera Tapak iB pada tahun 2014 mencapai 20 nasabah. Namun, nasabah yang mendapatkan KPR Sejahtera Tapak iB hanya 2 nasabah setelah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Sasaran KPR bersubsidi di BRI Syariah KC. Sidoarjo adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilan setiap bulannya maksimal sebesar Rp 4.000.000,- dan sudah bekerja minimal selama dua tahun.

Dalam persyaratan pengajuan pembiayaan pada dasarnya Pemerintah tidak pernah menetapkan batas terendah penghasilan nasabah yang melakukan pembiayaan dan termasuk dalam Masyarakat

Berpenghasilan Rendah untuk memperoleh KPR bersubsidi. Tidak adanya patokan penghasilan terendah memiliki tujuan agar semua lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah mampu melakukan pembayaran angsuran KPR bersubsidi. Tetapi yang menjadi dasar adalah peraturan besar pendapatan dengan besar angsuran KPR maksimal 30% dari penghasilan nasabah setiap bulannya. Melalui program KPR bersubsidi maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah semakin besar. Menurut Via jika ada nasabah yang melakukan pengajuan KPR bersubsidi dengan gaji Rp 1,5 juta/bulan namun mengajukan cicilan Rp 1,3 juta/bulan, maka bank akan menolak pengajuan pembiayaan tersebut, karena bank memiliki patokan besarnya angsuran 30% dari gaji nasabah.

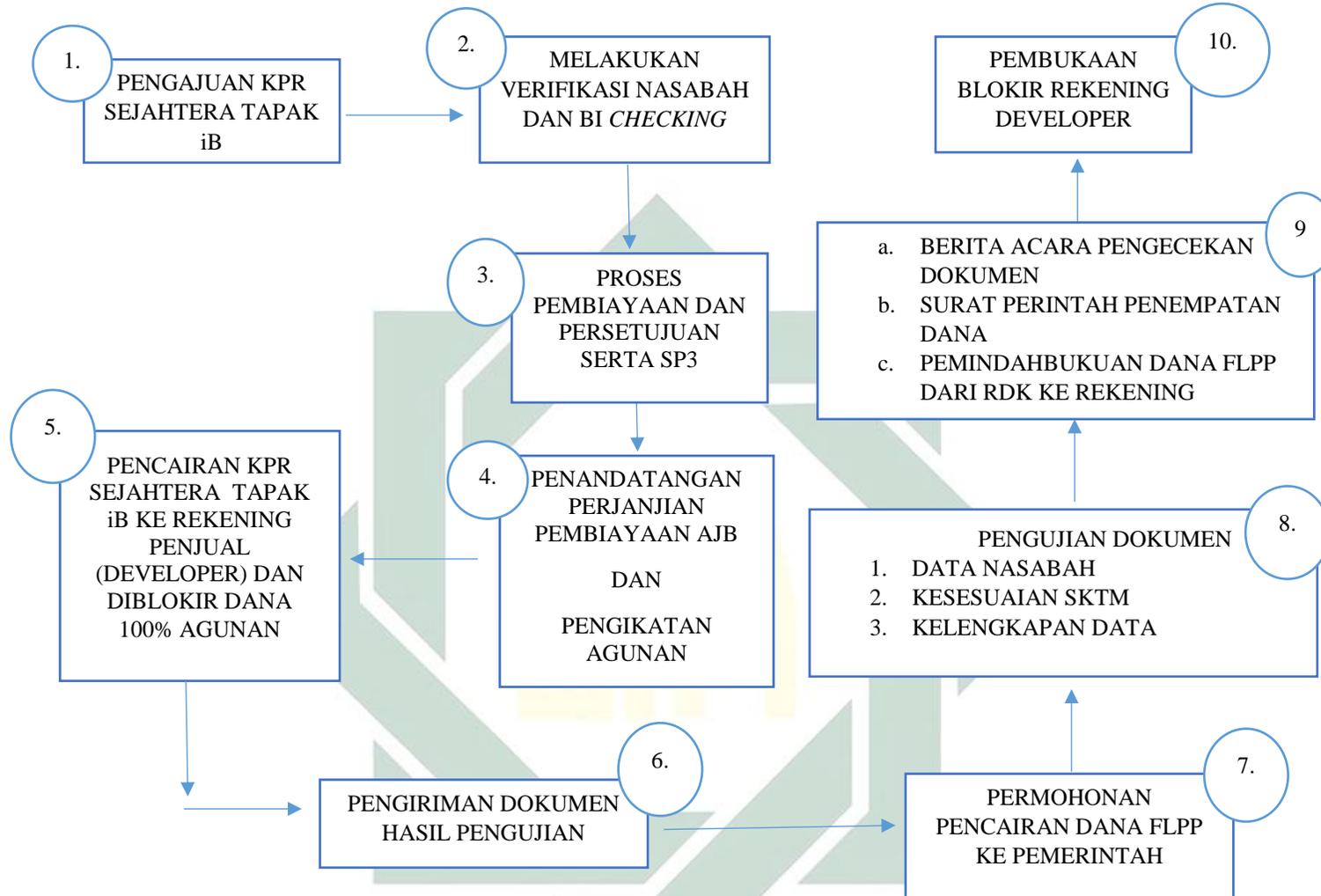
Berdasarkan hasil lapangan, kebanyakan nasabah yang melakukan pengajuan KPR Syariah bersubsidi di BRI Syariah KC. Sidoarjo merupakan karyawan tetap atau buruh yang memiliki gaji sekitar 3jt-3,8jt setiap bulannya dibuktikan dengan slip gaji bulanan. Rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Syariah subsidi sudah tidak memiliki cicilan atau angsuran pada barang lain saat pengajuan KPR Syariah bersubsidi. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan perbankan dalam penerimaan calon nasabah yang layak untuk menerima pembiayaan KPR Syariah bersubsidi di BRI Syariah KC. Sidoarjo.

Dalam mengajukan produk pembiayaan KPR bersubsidi di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, calon nasabah yang melakukan pengajuan diharapkan memahami prosedur dan alur atau mekanisme pembiayaan KPR Syariah bersubsidi serta beberapa persyaratan administrasi berupa dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh nasabah pembiayaan KPR Syariah bersubsidi.

Calon nasabah perlu memahami alur dan prosedur dalam melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. Hal ini dikarenakan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan dana subsidi dari Pemerintah.

Gambar 4.2

Skema Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo



Dari Skema Penyaluran pembiayaan KPR Syariah Tapak iB diatas kita dapat mengetahui alur pengajuan KPR subsidi di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo sebagai berikut :

- 1) Nasabah melakukan pengajuan KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo dengan mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh Bank Syariah. Selanjutnya dilakukan proses *checking* sebagai verifikasi data calon nasabah.
- 2) Setelah melakukan verifikasi data nasabah, maka AO dan *Manager Marketing* akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal nasabah dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen (surat keterangan pejabat setempat bahwa nasabah belum punya rumah).
- 3) Proses Pembiayaan dan Persetujuan serta SP 3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan) sebagai awal persetujuan bahwa bank dan nasabah akan melakukan pembiayaan sesuai dengan syariah.
- 4) Setelah semua proses tersebut dilakukan, maka bank dan nasabah melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan akad jual beli, dan pengikatan pada agunan yang telah disepakati.
- 5) Selanjutnya, setelah melakukan akad jual beli maka lanjut pada proses pencairan KPR Sejahtera Tapak iB

ke rekening penjual (developer) dan dana yang ada di blokir 100% untuk tetap berada di rekening dan tidak bisa diambil.

- 6) Selanjutnya, dokumen yang telah di *screening* akan dikirimkan ke pusat untuk mendapatkan pencairan. Semua dokumen hasil pengujian dikirim untuk mendapatkan pencairan subsidi dari pemerintah.
- 7) Setelah itu, dilakukan permohonan pencairan dana FLPP ke pemerintah agar dana segera cair.
- 8) Setelah semua selesai dilakukan maka ada hasil pengujian untuk dokumen nasabah yaitu data nasabah, kesesuaian SKTM, kelengkapan data yang dimiliki calon nasabah FLPP.
- 9) Setelah semua lengkap, akan dibuat berita acara pengecekan dokumen, surat perintah penempatan dana, pemindahbukuan dana FLPP dari RDK ke rekening program BRIS.
- 10) Setelah semua disetujui, maka dilakukan pembukaan blokir dari rekening developer ke nasabah untuk pencairan dana subsidi. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan angsuran setiap bulannya.

Dokumen-dokumen Persyaratan Pengajuan KPR Sejahteran
Tapak iB BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo dibuktikan dengan rekening tabungan
- 3) Telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun
- 4) Pelunasan KPR Syariah bersubsidi tidak melebihi 70 tahun atau usia pensiun
- 5) Belum pernah memiliki rumah sebelumnya
- 6) Memiliki penghasilan yang telah memenuhi syarat menurut perhitungan Bank (Maksimal gaji pokok 4 juta rupiah perbulan)
- 7) Mempunyai pekerjaan/usaha dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun
- 8) Tidak masuk daftar hitam dalam pembiayaan bermasalah
- 9) Melampirkan SPT tahunan atau NPWP

b. Kelengkapan Data Permohonan Pembiayaan :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Fotocopy SPT tahunan PPH individu atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai dengan sepengetahuan kepala perusahaan tempatnya bekerja (bagi nasabah berpenghasilan tetap) dan diberi bubuh ttd kelurahan (untu nasabah yang memiliki penghasilan tetap).
- 4) Surat keterangan berpenghasilan tetap dari instansi tempat bekerja /slip gaji untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki penghasilan tetap.
- 5) Surat Keterangan bahwasanya nasabah belum pernah memiliki rumah dari RT/RW setempat atau instansi tempatnya bekerja atau Surat Keterangan Sewa/Kwitansi Sewa Rumah
- 6) Surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai yang mencakup :
 - a) Memiliki penghasilan tidak melebihi ketentuan kelompok sasaran KPR Sejahtera Tapak iB
 - b) Belum pernah memiliki rumah sebelumnya

Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini dikarenakan produk pembiayaan atau pendanaan yang digunakan atau di pasarkan kepada masyarakat sudah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), jika sudah memperoleh pendapat resmi dari DPS, maka sudah memenuhi standar dan sesuai syariah. Selain itu, KPR Syariah subsidi juga telah diawasi oleh MUI untuk ketentuan syariahnya. Hal ini karena KPR Syariah bersubsidi menggunakan akad jual-beli *murabahah*. Alur KPR Sejahtera Tapak iB dari penerimaan pengajuan permohonan kepemilikan rumah dari nasabah, kemudian bank melakukan *checking* semua data nasabah, setelah dokumen yang diperiksa aman, maka bank akan membeli rumah dari *developer* yang akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati.

Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi telah menerapkan ketentuan syariah yang ditunjukkan dengan proses pembiayaan dan akad *murabahah*. Berdasarkan temuan lapangan menyatakan bahwa Pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo telah menyalurkan 18 rumah subsidi. Dari 18 unit rumah tersebut, total dana yang tersalurkan yaitu Rp 2.894.845.354 dari alokasi dana sebesar Rp 4-5M dalam perencanaan.

Namun, di tengah situasi terbaru saat sampai penelitian ini dilakukan, harga tanah mengalami kenaikan yang membuat harga rumah subsidi juga naik, sehingga BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo tidak mengajukan alokasi dana penyaluran perumahan subsidi pada pemerintah lagi. Hal itu dikarenakan, semakin menurunnya minat masyarakat akan kepemilikan rumah subsidi yang semakin mahal. Banyak masyarakat saat ini lebih memilih membeli rumah non subsidi yang harganya tidak jauh beda dengan KPR Syariah bersubsidi tetapi dengan bangunan yang lebih baik.

Selain itu, bangunan rumah subsidi merupakan bangunan yang sederhana bahkan masih membutuhkan banyak perbaikan. Tujuan dibentuknya program KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo untuk mensejahterakan masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau. Karena rumah merupakan kebutuhan primer sebagai bagian dari sandang, pangan, papan yang harus dipenuhi demi tercapainya kenyamanan hidup. Tetapi, jika banyak bangunan yang tidak layak dan harga rumah subsidi tidak jauh beda dengan harga rumah biasa, maka banyak nasabah memilih membeli rumah non-subsidi.

C. Efektivitas Penyaluran KPR Syariah Bersubsidi di BRI Syariah KC. Sidoarjo dengan akad *Murabahah*.

Dalam KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, memperhatikan berbagai aspek agar menjadi program pembiayaan yang efektif sesuai dengan tujuan Pemerintah. Efektivitas suatu program dapat tercapai jika fungsi dan tujuan program terwujud sesuai dengan rencana. Hal tersebut bisa dilihat melalui program yang tepat sasaran, adanya kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan, program bisa dijangkau oleh masyarakat umum, lalu tersedianya sumber daya yang mendukung untuk berjalannya suatu program dan akuntabilitas dalam penyaluran dana.

Oleh karena itu, efektivitas KPR Syariah bersubsidi di BRI Syariah KC. Sidoarjo dapat dikatakan efektif jika memenuhi faktor-faktor dalam pencapaian efektivitas. Efektivitas suatu program menurut T. Hani Handoko dalam bukunya (Manajemen: 1998) dapat diketahui melalui beberapa kriteria berikut ini :

- 1) Fungsi dan Tujuan dari KPR Syariah bersubsidi,** untuk memberikan kesejahteraan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu memiliki rumah. Berdasarkan hasil temuan lapangan, nasabah yang melakukan KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo merasa terbantu akan program KPR bersubsidi tersebut. Hal ini dikarenakan mereka merasa senang bisa mengangsur rumah untuk keluarga mereka.

Banyak nasabah yang melakukan pembiayaan juga berasal dari luar kota dari lokasi perumahan bersubsidi yang ada. Hal ini dikarenakan lokasi perumahan bersubsidi yang strategis membuat nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi bisa tetap bekerja diluar kota dengan mengendarai transportasi umum dan tetap berpenghasilan untuk mengangsur KPR.

Sesuai dengan fungsinya, rumah menjadi tempat berlindung bagi manusia dari panas, hujan, dan memberikan rasa nyaman dari kejahatan. Oleh karena itu, pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman dan menjadi tempat berlindung bagi MBR dari teriknya matahari dan hujan. Dengan begitu, rumah subsidi sangat membantu MBR dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu memiliki rumah.

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh H. Emerson dalam kutipan yang dibuat oleh Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) menjelaskan tentang “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dari rencana yang dibuat pada masa lampau”. Selain itu, Menurut Mulyasa dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi, dan Konsep (2004:82) menjelaskan, efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan

antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Berdasarkan teori tersebut dan hasil lapangan, maka KPR Sejahtera Tapak IB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo sudah sesuai fungsi dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya MBR untuk memiliki rumah atau hunian yang layak melalui KPR Syariah bersubsidi.

Oleh karena itu, KPR Sejahtera Tapak IB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo menjadi KPR Syariah bersubsidi yang efektif karena sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya program KPR Syariah bersubsidi untuk MBR.

- 2) **Tepat sasaran**, KPR Syariah bersubsidi merupakan program Pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu memiliki rumah sendiri. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah karena rumah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Melalui KPR Syariah bersubsidi Pemerintah ingin membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah atau hunian dengan angsuran ringan dan margin flat sehingga tidak menjadi beban bagi MBR.

Sasaran dari KPR Syariah bersubsidi yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan gaji dibawah 4jt per bulan dan sudah menjadi karyawan tetap minimal dua tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan slip gaji yang disetorkan nasabah kepada bank.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo merupakan masyarakat dengan gaji maksimal 3,8jt per bulannya dan sudah menjadi karyawan tetap selama dua tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan slip gaji dari nasabah yang melakukan pengajuan KPR Sejahtera Tapak iB.

BRI Syariah KC. Sidoarjo memastikan program KPR Sejahtera Tapak iB tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum pernah memiliki rumah sebelumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan program KPR Syariah bersubsidi untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, agar KPR Sejahtera Tapak iB tepat sasaran maka pihak BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo melakukan *survey* pada calon nasabah yang melakukan pengajuan. *Survey* berguna untuk memastikan data bahwa nasabah yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Survey dilakukan dengan memastikan kevalidan data melalui Rukun Tetangga (RT), atau Kelurahan setempat dan tetangga sekitar bahwa nasabah yang bersangkutan tidak pernah memiliki rumah sebelumnya. Selain itu, BRI Syariah melakukan *survey* ke tempat kerja nasabah yang melakukan pengajuan KPR Syariah bersubsidi bahwa nasabah yang bersangkutan merupakan karyawan tetap dan bekerja selama dua tahun di perusahaan tersebut.

Pada dasarnya, Pemerintah tidak menetapkan kriteria khusus bagi pekerjaan calon nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. Hal ini dikarenakan Pemerintah berharap semua masyarakat yang berpenghasilan rendah mampu memiliki hunian atau rumah yang layak dan bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka.

Namun, berdasarkan hasil temuan lapangan di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, Perbankan memiliki kriteria khusus bagi nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. Hal ini agar nasabah mampu membayar angsuran KPR Syariah bersubsidi dan tidak terjadi kredit macet karena tidak mampu membayar angsuran KPR.

Selain itu, jika nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo terbukti melakukan kecurangan data atau bahkan merupakan tergolong masyarakat dengan penghasilan tinggi. Maka subsidi dari KPR Syariah tersebut akan dicabut dan dialihkan kepada pihak lain.

Nasabah yang telah mendapatkan KPR Syariah bersubsidi di BRI Syariah KC. Sidoarjo harus langsung menempati rumah subsidi tersebut. Jika nasabah tidak menempati rumah subsidi tersebut selama lebih dari satu tahun, maka pihak bank akan mencabut subsidi dan mengalihkan kepada nasabah lain yang lebih membutuhkan.

Oleh karena itu, agar KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo tepat sasaran, maka pihak bank akan melakukan *survey* setelah nasabah mendapatkan KPR. Selain itu, KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo sudah efektif karena nasabah yang melakukan pengajuan KPR sudah sesuai syarat yang telah ditentukan dan membayar angsuran secara lancar.

- 3) **Ruang Lingkup (Kemudahan)**, dalam hal ini KPR Syariah Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo juga memiliki aspek yang harus dipenuhi dalam kelengkapan administrasi, kesesuaian dengan fakta, dan tingkat konsistensi.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, kelengkapan administrasi dalam pengajuan KPR Sejahtera Tapak iB sangat banyak mencapai tiga belas formulir yang harus diisi oleh nasabah. Namun, pertama-tama pihak bank akan membacakan isi ketentuan KPR Syariah bersubsidi untuk nasabah. Dari akad *murabahah* sebagai akad jual beli yang digunakan.

Ketentuan-ketentuan besarnya margin yang *flat*, dan ketentuan besar angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya.

Syarat administrasi yang sangat banyak merupakan salah satu hal yang tidak efektif dalam pembiayaan KPR Syariah Sejahtera Tapak iB yang ada di perbankan syariah. Berdasarkan

hasil temuan lapangan dan wawancara dengan beberapa pihak bank dan nasabah. Seharusnya syarat administrasi yang dibuat oleh Pemerintah lebih ringkas, tetapi tidak menghilangkan hal-hal penting dalam pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang perlu untuk diketahui oleh nasabah.

Syarat administrasi seharusnya berupa point-point penting terkait akad yang digunakan, besaran margin, fasilitas, besaran angsuran yang harus dibayarkan, dan sanksi apabila ada hal-hal yang dilanggar oleh nasabah saat melakukan pembiayaan KPR Syariah Sejahtera Tapak iB.

Hal ini dikarenakan persyaratan administrasi merupakan tahap awal yang masih perlu dilakukan *survey* untuk kesesuaian dengan data yang dituliskan oleh nasabah. Saat syarat administrasi sudah terpenuhi, maka pihak bank akan melakukan *survey* untuk memastikan bahwa data yang ditulis nasabah benar adanya. Melalui *survey* lapangan pihak bank juga mampu memastikan bahwa nasabah yang bersangkutan belum pernah memiliki rumah sebelumnya.

Oleh karena itu, syarat administrasi yang terlalu banyak dinilai tidak efektif baik oleh pihak bank maupun nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah Sejahtera Tapak iB. Hal tersebut dikarenakan semakin membuat bingung pihak bank dan nasabah, bahkan beberapa perbankan syariah tidak mengambil

kuota KPR bersubsidi dikarenakan banyaknya administratif yang harus dipenuhi.

Diharapkan Pemerintah melalui KEMENPERA memiliki regulasi yang lebih sederhana, tetapi tetap memuat isi dari pembiayaan yang efektif dan tepat sasaran kepada nasabah yang membutuhkan.

4) Ketersediaan dan Keterjangkauan Lokasi Perumahan, Dalam KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah Sidoarjo.

Dalam hal ini, KPR Sejahtera Tapak iB yang ada di BRI Syariah KC. Sidoarjo merupakan KPR subsidi dengan rumah yang sudah hampir jadi, dalam artian ada wujud dan bentuk bangunan rumah subsidi tersebut. Rumah subsidi sudah dibangun sebagian oleh KEMENPERA melalui developer terkait, bukan *indend* atau belum ada wujudnya. Oleh karena itu, nasabah dijamin akan mendapatkan rumah atau hunian tempat tinggal yang diinginkannya.

Sehingga nasabah tidak perlu khawatir jika terjadi penipuan akan rumah subsidi. Karena KPR Sejahtera Tapak Ib di BRI Syariah KC. Sidoarjo merupakan KPR dengan rumah yang tersedia meski belum full bangunan. Hal ini dikarenakan banyaknya penipuan akan rumah subsidi dengan harga murah tapi tidak berwujud membuat banyak nasabah tidak percaya.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, harga rumah subsidi antara rumah satu dengan rumah lainnya berbeda. Hal tersebut tergantung pada fasilitas dan bangunan rumah yang sesuai dengan permintaan nasabah dan kesediaan bangunan. Harga rumah subsidi yang beragam membuat nasabah memiliki berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sampai dengan penelitian ini dilakukan, harga rumah subsidi berkisar antara 140-160 juta rupiah yang bisa diangsur dengan jangka waktu maksimal 20 tahun dan margin flat sebesar 5% dari BRI Syariah KC. Sidoarjo. Hal tersebut sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah atau hunian idaman.

Banyak nasabah memilih untuk mengambil rumah subsidi dengan harga 140 juta meski rumah subsidi tersebut alasnya belum berkeramik. Hal ini dikarenakan rumah tersebut memiliki angsuran yang lebih ringan dan nasabah bisa memperbaikinya seiring dengan berjalannya waktu.

Lokasi perumahan bersubsidi yang ada di Mojokerto sangat terjangkau dan memiliki kemudahan akses untuk menuju luar kota. Hal ini dikarenakan lokasi perumahan bersubsidi tersebut sangat dekat dengan stasiun, terminal, dan akses kendaraan untuk pergi ke luar kota.

Oleh karena itu, KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo sebagai KPR bersubsidi sudah terjangkau dan rumah yang hendak dijadikan KPR tersedia, dalam artian sudah berwujud. Sehingga, KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC.Sidoarjo sudah efektif dalam ketersediaan dan keterjangkauan sesuai dengan program Pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian idaman yang layak.

- 5) **Sumber Daya Manusia yang tersedia**, dalam menjalankan produksi atau program menjadi salah satu hal yang patut untuk diperhatikan dalam mencapai program yang efektif.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo memiliki banyak sumber daya manusia yang menangani proses KPR bersubsidi. Dari proses pengajuan, akad, angsuran, sampai dengan penutupan akun karena pelunasan.

Hal ini agar program bisa berjalan dengan lancar dan menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. Nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi akan mendapatkan hunian yang layak untuk kebahagiaan keluarga.

Selain itu, pihak bank yang akan menangani KPR syariah bersubsidi merupakan *Account Officer Manager* (AOM),

Marketing Manager, Legal, dan berbagai pihak untuk memenuhi teknis dan dokumen KPR Syariah bersubsidi.

Semakin banyak sumber daya manusia yang mengerjakan suatu program maka akan membuat keberhasilan suatu program semakin tinggi. Hal ini membuat KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo memiliki efektivitas yang tinggi. Karena banyak sumber daya manusia yang mengerjakan dan membantu dalam penyelesaian KPR bersubsidi tersebut.

6) Penyaluran dan Akad

Dalam mencapai efektivitas suatu program, maka besarnya penyaluran dana dan realisasi program merupakan hal yang terpenting. Berdasarkan teori, Suatu program dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa presentase efektivitas KPR Sejahtera Tapak iB atau FLPP di BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo yaitu 72% yang telah tersalurkan dari rencana penyaluran yang telah dibuat dengan besaran dana Rp. 2.894.845.354 dari kuota sebesar 4-5M. Penyaluran 18 unit rumah FLPP telah disalurkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. Hal ini sudah sangat efektif dan besar

karena hampir mencapai target program yaitu menyalurkan 20 unit rumah subsidi.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan lapangan dan data yang didapatkan. Nasabah yang melakukan pembiayaan KPR Syariah Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo membayar angsuran secara rutin dan lancar. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor bahwa KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo merupakan KPR bersubsidi yang efektif, baik dari segi penyaluran maupun dari segi pembiayaan dikarenakan semua nasabah lancar dalam membayar angsuran.

Selain itu, akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo merupakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang artinya jual beli rumah antara pihak bank dan nasabah dengan kesepakatan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad *murabahah* bisa terjadi jika barang sudah jelas wujudnya, oleh karena itu rumah subsidi di BRI Syariah KC. Sidoarjo yang ditawarkan merupakan rumah subsidi dengan bangunan yang sudah terbangun setengahnya dan bisa dihuni. Hal ini membuat terjaminnya pembiayaan, tidak ada penipuan karena rumah sudah berwujud dan nasabah yang melakukan pembiayaan melakukan angsuran untuk pembangunan dan penyelesaian bangunan.

Akad *murabahah* di BRI Syariah KC. Sidoarjo khususnya dinilai sangat efektif oleh nasabah. Hal ini dikarenakan, banyak nasabah yang awam akan akad tersebut menjadi paham karena sebelum akad pihak bank menjelaskan terlebih dahulu terkait akad *murabahah* tersebut. Sehingga banyak nasabah bisa memahami dan bersedia untuk melakukan penandatanganan akad untuk KPR Sejahtera Tapak iB.

Oleh karena itu, KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah telah efektif dengan presentase efektivitas 72% dalam penyaluran dan pembiayaan. Hal ini dikarenakan banyak nasabah merasakan manfaat akan adanya KPR bersubsidi tersebut.

Namun, sampai penelitian ini dilakukan oleh penulis terkait KPR Sejahtera Tapak iB di BRI Syariah KC. Sidoarjo. Meski sudah mampu menyalurkan 18 unit rumah subsidi dari 20 unit rumah sebagai target penyaluran dan semua nasabah lancar dalam membayar angsuran KPR. Namun, pihak BRI Syariah KC. Sidoarjo tidak lagi mengambil kuota KPR bersubsidi dari pemerintah.

Hal ini dikarenakan, rumah subsidi yang ada hanya berada di daerah Mojokerto dan sekitarnya. Harga tanah yang sangat tinggi di Sidoarjo membuat tidak ada rumah subsidi di daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Selain itu, banyaknya formulir dan dokumen yang tidak membuat pihak bank harus ekstra bekerja dengan mendapatkan profit yang tidak banyak atau tidak sebanding.

